



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan	i
Halaman Pernyataan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Bagan	xi
<b>ABSTRAKSI</b>	<b>xii</b>

### **BAGIAN I: KONTEKS PENELITIAN** (Latar Belakang, Tujuan, Metode dan Konteks Makro)

<b>BAB I:</b>	<b>DINAMIKA DAN MASALAH PROGRAMATIK PENGEMBANGAN KAPASITAS DPRD</b>	<b>1</b>
	1.1. Latar Belakang Masalah	1
	1.2. Rumusan Permasalahan	18
	1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	23
	1.4. Rancangan Penulisan	26
<b>BAB II:</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA: KERANGKA KONSEPTUAL CAPACITY BUILDING KEPARLEMENAN</b>	<b>30</b>
	2.1. <i>Capacity Building</i>	30
	2.2. Konsep struktural-fungsional dan implementasi kebijakan	34
	2.3. Keterkaitan mutu pelayanan dan kinerja dewan	43
	2.4. Keterkaitan konsep desentralisasi dan otonomi daerah dengan peningkatan kapasitas DPRD	47
	2.5. Konsep parlementarisme di era otonomi daerah	51
	2.6. Konsep <i>capacity building</i> dalam konteks politik-ekonomi dan jaringan kebijakan	54
	2.7. Konsep <i>good and democratic governance</i>	58
	2.8. Cakupan Minimal dalam <i>CapacityAssesmet</i> terhadap DPRD	61



<b>BAB III:</b>	<b>METODE PROGRAMATIK <i>CAPACITY ASSESSMENT</i></b>	<b>68</b>
	3.1. Metode Rapid Assesment	68
	3.2. Konsep-Konsep	69
	3.3. Pengumpulan Data Penelitian	73
	3.4. Kelompok Sasaran dan Lokasi Penelitian	74
	3.5. Metode Analisis Data	75
<b>BAB IV:</b>	<b>KONTEKS MAKRO PENELITIAN: PELAKSANAAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>78</b>
	4.1. Tantangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	78
	4.2. Dinamika Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	87
	4.3. Perlunya Menata-ulang Tata Pemerintahan Daerah	97
	4.4. Etika Aparatur: Penangkal Dampak Negatif Desentralisasi	104
<b>BAGIAN II: PENILAIAN TERHADAP KAPASITAS DPRD DALAM TATA PEMERINTAHAN DEMOKRATIS</b>		
<b>BAB V:</b>	<b>KAPASITAS DPRD DALAM PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH</b>	<b>116</b>
	5.1. Sistem dan Prosedur Legislasi	116
	5.2. Akuntabilitas Produk Legislasi DPRD	128
	5.3. Membangun Sistem dan Prosedur Legislasi Minimal	141
	5.4. Tata Tertib Dewan yang Mengatur Legislasi: Kasus DPRD Kota Yogyakarta	147
<b>BAB VI:</b>	<b>KAPASITAS DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGANGGARAN</b>	<b>152</b>
	6.1. Kinerja Pelaksanaan Fungsi Penganggaran oleh DPRD	152
	6.2. Substansi fungsi penganggaran DPRD	155
	6.3. Efektifitas mekanisme penganggaran DPRD	171
	6.4. Pentingnya Pelayanan Budgeting Information System DPRD	176
<b>BAB VII:</b>	<b>KAPASITAS DPRD DALAM MENGAWASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK</b>	<b>179</b>
	7.1. Kinerja Pengawasan Secara Umum	179
	7.2. Prosedur dan Mekanisme DPRD dalam Pengawasan Kebijakan Publik	182
	7.3. Pemantauan Terhadap Kinerja DPRD	197



<b>BAB VIII:</b>	<b>DPRD SEBAGAI LEMBAGA KUNCI <i>DEMOCRATIC GOVERNANCE</i></b>	<b>203</b>
	8.1. Pemahaman DPRD atas Konsep dan Prinsip-prinsip Good Governance	203
	8.2. Kesiapan DPRD Mewujudkan <i>Democratic Local Governance</i>	211
	8.3. Tantangan dalam Mewujudkan <i>Democratic Local Governance</i>	221
 <b>BAGIAN III: BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAPASITAS DPRD</b>		
<b>BAB IX:</b>	<b>KAPASITAS SEKRETARIAT DPRD SEBAGAI <i>SUPPORT SYSTEM</i></b>	<b>227</b>
	9.1. Kondisi Umum Sekretariat DPRD	227
	9.2. Perlunya Mengembangkan Standar Kinerja Minimal Sekretariat DPRD	236
<b>BAB X:</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAPASITAS KEPARLEMENAN</b>	<b>239</b>
	10.1. Kondisi Politik Kepartaian dan Keterwakilan	239
	10.2. Kekuatan Politik Riil dari Birokrasi	243
	10.3. Kondisi Sosial dan Kesiapan Lembaga Masyarakat Sipil	249
	10.4. Komitmen Media dalam Demokratisasi dan Reformasi Tata Pemerintahan	252
	10.5. Prasyarat Ekonomi bagi <i>Democratic Governance</i>	255
	10.6. Partisipasi Politik Perempuan dan Kesetaraan Gender	259
 <b>BAGIAN IV: KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
<b>BAB XI:</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN: PEMBANGUNAN KAPASITAS DPRD SECARA TERSTRUKTUR DAN SISTEMATIS</b>	<b>266</b>
	11.1. Kesimpulan	266
	11.2. Saran Untuk Pengembangan Program	285
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>295</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. GG, GCG, WCR	4
Tabel 1.2. Indeks Daya Saing Pertumbuhan (GCI) untuk negara-negara ASEAN	5
Tabel 1.3. Indeks Daya Saing Mikroekonomi negara-negara ASEAN	5
Tabel 2.1. Adaptasi Konsep Sistem untuk Pemahaman Kapasitas DPRD	33
Tabel 2.2. Model implementasi kebijakan untuk DPRD di Indonesia	37
Tabel 2.3. Beberapa Dimensi Mutu Pelayanan Substantif	43
Tabel 2.4. Beberapa Dimensi Mutu Pelayanan Administratif dan Manajerial	44
Tabel 2.5. Bentuk-bentuk Desentralisasi	47
Tabel 2.6. Perbandingan dan Realitas Sistem Pemerintahan di Indonesia	50
Tabel 2.7. Cakupan Dasar Capacity Assessment DPRD	60
Tabel 3.1. Elemen-elemen Dasar Kajian Kapasitas Kelembagaan	66
Tabel 3.2. Daerah Penelitian	73
Tabel 5.1. Jumlah Produk Legislasi (1999-2003)	115
Tabel 5.2. Jumlah PerDa yang Dihasilkan Hingga Tahun 2002	119
Tabel 5.3. Perbedaan pandangan tentang implementasi kebijakan desentralisasi	126
Tabel 5.4. Tahap-tahap Penyusunan PerDa	139
Tabel 7.1. Batasan Pengawasan oleh DPRD	192
Tabel 8.1. Good Governance: Prinsip, indikator dan instrumen	206
Tabel 8.2. Matriks pelaku tata pemerintahan demokratis di daerah	211
Tabel 8.3. Perbandingan prinsip Good Governance Umum dan Indonesia	212
Tabel 8.4. Tahap pengembangan dan pematangan peningkatan kapasitas kelembagaan	213
Tabel 9. 1. Perbandingan Kapasitas Pelayanan dan Harapan terhadap Sekretariat DPRD	225
Tabel 9.2. Ringkasan Dimensi Kinerja Pelayanan	233
Tabel 10.1. Model hubungan antara DPRD dan Birokrasi Pemerintah Daerah	243
Tabel 10.2. Prakondisi <i>democratic governance</i>	250



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 6.1. Tahap I - Penentuan Agenda dan Prioritas Pembiayaan APBD	160
Gambar 6.2. Tahap II – Perumusan Analisis Dasar dan Asumsi	163
Gambar 6.3. Tahap III – Perumusan dan Pembahasan RAPBD Partisipatif	164
Gambar 6.4. Tahap IV – Penetapan APBD	166
Gambar 6.5. Tahap V – Identifikasi Kesenjangan Penganggaran	167
Gambar 8.1. Kompleksitas Good Governance	202
Gambar 8.2. Bad Governance dan Kemiskinan	203